

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Politik adalah bagian yang melekat pada hidup setiap orang sebagai ciptaan sosial dan tidak dapat dipisahkan dari interaksi sosial sehari-hari. Dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, politik berperan penting dalam proses pengambilan keputusan, pengaturan kekuasaan, serta upaya mencapai kesejahteraan bersama. Secara hakiki, politik tidak selalu bermakna negatif, melainkan merupakan sarana untuk menata kehidupan bersama secara adil dan teratur. Namun dalam realitas sosial, politik seringkali dipersepsikan secara negatif karena praktik politik yang tidak bermoral, seperti memberikan uang untuk memengaruhi pemilih, penyalahgunaan kekuasaan, dan tindakan lain yang melanggar etika kepentingan kelompok tertentu.¹

Perbedaan pilihan dalam pemilihan kepala Desa adalah ini adalah bagian oleh proses perubahan dan harus dihormati menjadi sebuah bentuk kebebasan berekspresi.² Padahal, pada tingkatan desa, bedanya pandangan ini seringkali memiliki pengaruh bermasyarakat yang signifikan. Di Balla Tumuka, pemilihan kepala daerah tahun 2023 bukan sekadar ajang

¹ Novallick Elungan dan Roy Dekky Tamaweol, "Pandangan Yohanes Calvin Tentang Hubungan Gereja dan Politik serta Relevansinya Bagi Jemaat" 5, no. 1 (2024): 97–109.

² Emilda Sulasmi Anshori Akyar, Ishomuddin, Wahyuni, *KOMUNIKASI POLITIK ETNIS SUMATERA UTARA* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2025), 67.

kompetisi antar kandidat. Peristiwa itu juga membawa ketegangan di tengah jemaat. Munculnya beberapa kelompok di dalam jemaat membuat suasana menjadi kurang harmonis. Dalam sejumlah situasi, perbedaan pilihan politik memicu perdebatan bahkan gesekan di antara anggota jemaat. Sebagian warga akhirnya memilih menjaga jarak satu sama lain karena perbedaan dukungan. Ada pula yang menjadi enggan terlibat dalam kegiatan gereja. Fenomena ini memperlihatkan bahwa walaupun pemilu berlangsung dalam waktu yang terbatas, dampak sosialnya dapat bertahan cukup lama dan memengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari. Tidak hanya memengaruhi hubungan antar warga, dampak dari pemilu tersebut juga terasa pada relasi antara masyarakat dengan pemerintah desa.³

Politik pada awalnya bukanlah sesuatu selalu negatif dalam praktiknya dalam kehidupan berorganisasi, apalagi dalam kehidupan beragama.⁴ Orang-orang Kristen masih sangat peka dan sensitif ketika membicarakan peran politik dalam gereja, seolah-olah di dalam gereja tidak ada praktik politik. Pemikiran seperti ini akhirnya membuat gereja kesulitan untuk terlibat dalam dunia politik dan membuat mereka kewalahan dalam memahami politik itu sendiri.⁵

³ Dwi Yanti Paputungan, Rauf A Hatu, dan Dewinta Rizky Hatu, "Dampak Perbedaan Pilihan Politik Pilkada terhadap Hubungan Masyarakat dan Pemerintah Desa Mooat" 4, no. 4 (2025): 2766–2776.

⁴ Jurnal Teologi et al., "HAMBIA TUHAN DAN POLITIK PRAKTIS : KAJIAN TEOLOGIS-ETIS TERHADAP PANGGILAN HAMBIA" 3, no. September (2021): 59–64.

⁵ Tri Tunggal et al., "Paradoks Integritas Pemimpin Kristen dalam Menghadapi Polarisasi Politik dan Identitas Kelompok di Toraja justru dapat membutakan komunitas terhadap

Partisipasi politik dari kalangan Kristen mulai terlihat pada dekade kedua abad ke-16.⁶ ketika muncul gagasan tentang kemerdekaan dan persatuan Indonesia. Pengaruh politik tidak hanya dirasakan dalam ranah pemerintahan, tetapi juga merambah ke berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk kehidupan beragama. Gereja sebagai bagian dari masyarakat tidak dapat sepenuhnya terlepas dari dinamika politik yang berkembang di sekitarnya. Oleh karena itu, relasi antara gereja dan politik menjadi suatu realitas yang tidak dapat dihindari.⁷ Dalam konteks ideal, gereja memiliki peran profetis dalam kehidupan politik, yaitu menyuarakan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan perdamaian berdasarkan iman Kristen. Gereja dipanggil untuk membina jemaat agar memiliki sikap politik yang bertanggung jawab, etis, dan berpihak pada kesejahteraan bersama.⁸ Namun dalam praktiknya, relasi antara gereja dan politik sering kali menimbulkan persoalan, terutama ketika kepentingan politik praktis masuk ke dalam struktur dan kehidupan internal gereja.

Kondisi tersebut juga terjadi dalam Gereja Toraja Mamasa Jemaat Maranatha Balla Peu, Dalam struktur sosial tersebut, tokoh-tokoh pemerintahan desa sering kali juga memegang peran penting dalam

inkonsistensi etika pemimpin yang mereka ajaran teologis tentang integritas kepemimpinan dengan praktik po” 3, no. November (2025).

⁶ Jan S Aritonang, “MINAT DAN PILIHAN POLITIK ORANG KRISTEN INDONESIA 1955 - 2009 Sebuah Kajian Historis-teologis” (2009): 2006–2007.

⁷ Adi Putra, “Memahami Secara Teologis Politik Dalam Gereja” 3 (2023): 78–92.

⁸ Cory Febrica Bella, “Gereja Terpanggil Menyuarakan Isu Sosial Melalui Pemimpin Gereja : Analisis Walter Rauschenbusch Terhadap Jabatan Kepemimpinan di Gereja” 3, no. 2 (2022): 140–152.

kehidupan gereja. Berdasarkan realitas di lapangan, kepala desa dan sekretaris desa sekaligus menjabat sebagai majelis gereja. Rangkap jabatan antara struktur pemerintahan desa dan struktur kepemimpinan gereja berpotensi menimbulkan konflik peran dan kepentingan. Sebagai aparat desa, seseorang memiliki otoritas administratif dan politik yang harus dijalankan secara netral dan melayani seluruh masyarakat. Sementara sebagai majelis gereja, ia memiliki tanggung jawab rohani dan organisatoris yang berorientasi pada pelayanan jemaat. Ketika kedua peran ini dijalankan oleh individu yang sama, batas antara kepentingan gereja dan kepentingan politik menjadi kabur.

Akibatnya, muncul berbagai persepsi di kalangan jemaat, seperti anggapan bahwa gereja berpihak pada kepentingan tertentu, keputusan gereja dipengaruhi oleh kekuasaan politik, atau jemaat merasa enggan menyampaikan pendapat karena adanya relasi kuasa yang tidak seimbang. Situasi ini dapat melemahkan kepercayaan jemaat terhadap kepemimpinan gereja dan berpotensi memicu konflik internal. Selain itu, kuatnya relasi kekerabatan dan kelompok sosial dalam jemaat turut mempengaruhi dinamika politik gereja. Keputusan-keputusan gerejawi tidak jarang dipengaruhi oleh relasi keluarga atau kelompok tertentu, sehingga gereja berisiko menjadi arena perebutan pengaruh, bukan lagi ruang persekutuan yang mempersatukan jemaat dalam kasih Kristus.

Oleh karena itu, strategi pendeta sebagai pemimpin gereja menjadi sangat penting dalam menghadapi dinamika politik internal tersebut. Pendeta sebagai Pemimpin gereja dituntut untuk memiliki kebijaksanaan, integritas, serta kemampuan membedakan antara kepentingan pelayanan dan kepentingan politik praktis. Kepemimpinan gereja harus berlandaskan pada prinsip pelayanan, transparansi, dan partisipasi jemaat, agar gereja tetap setia pada panggilannya sebagai tubuh Kristus dengan demikian, gereja diharapkan mampu mengelola dinamika politik internal secara bijaksana dan tetap menjadi ruang persekutuan yang membangun iman, persatuan, dan kesejahteraan jemaat.⁹

Pendeta sebagai pelayan Tuhan sebagai yang mengembalakan dan membina serta tidak terlepas dari realitas kehidupan sosial dan kenegaraan. Dalam Roma 13:1–4 ditegaskan bahwa pemerintah adalah hamba Allah yang diberi mandat untuk memelihara ketertiban dan menegakkan keadilan. Namun demikian, kesetiaan utama orang percaya tetap tertuju kepada Allah sebagai otoritas tertinggi (Kisah Para Rasul 5:29). Dengan demikian, pendeta berada dalam dinamika ketegangan antara tanggung jawab kenegaraan dan panggilan rohani.¹⁰ Gereja dipanggil menjadi terang dan garam dunia sebagaimana tertulis dalam Injil Matius 5:13–16. Panggilan ini mengingatkan bahwa gereja tidak hanya hadir untuk

⁹ Ronald Helweldery, "Gereja dalam Konteks Relasi Negara dan Masyarakat: Sebuah Upaya Memahami Reposisi Peran Politis Gereja," *WASKITA, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, no. 69 (2014): 123–145.

¹⁰ Edgar Wals, *Bagaimana Mengelola Gereja Anda* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), 7.

ibadah semata, tetapi juga menghadirkan nilai-nilai Kerajaan Allah dalam kehidupan sosial, termasuk di tengah dinamika dan tantangan kehidupan sosial-politik masyarakat sehari-hari. Panggilan ini bersifat transformatif, yaitu membawa pembaruan yang dimulai dari individu, menjangkau keluarga, dan meluas ke dalam masyarakat. Transformasi tersebut berakar pada karya keselamatan Kristus (Yohanes 3:16). Dalam perspektif teologi publik, gereja tidak boleh menarik diri dari kehidupan sosial, melainkan hadir sebagai saksi kebenaran dan pembawa damai.¹¹

Alkitab menegaskan bahwa setiap manusia tidak luput dari dosa. Dalam Roma 3:23 dijelaskan bahwa semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Pernyataan ini mengingatkan bahwa manusia memiliki keterbatasan dan kelemahan, sehingga membutuhkan kasih karunia serta pengampunan dari Allah dalam menjalani hidup. Karena itu, baik pendeta maupun jemaat sama-sama membutuhkan kasih karunia Tuhan. Gambaran umat sebagai “domba di tengah-tengah serigala” menunjukkan bahwa pelayanan berlangsung dalam realitas yang penuh tantangan.¹² Dalam konteks dinamika politik gereja, pendeta memerlukan hikmat dan ketergantungan penuh kepada Allah. Rasul Paulus menegaskan bahwa kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam kelemahan manusia (2

¹¹ Jerry Parimba, “Rasionalitas Komunikasi Sebagai Pilihan Gereja Dalam Melawan Politik Uang Di Toraja,” *Melo: Jurnal Studi Agama-agama* 1, no. 1 (2021): 61-62.

¹² Adolf Bastian Simamora, “POLITIK MENURUT ALKITAB DAN IMPLIKASINYA BAGI PERAN GEREJA DALAM PUSARAN POLITIK DI INDONESIA,” *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama* 2 (2019).

Korintus 12:9). Kepemimpinan Kristen berakar pada teladan Kristus sebagai hamba yang melayani (Matius 20:26–28). Alkitab menyatakan bahwa tidak ada manusia yang sepenuhnya bebas dari dosa. Dalam Roma 3:23 ditegaskan bahwa semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Hal ini menunjukkan keterbatasan manusia sebagai ciptaan yang lemah, sehingga setiap orang membutuhkan kasih karunia serta pengampunan dari Allah dalam menjalani kehidupan.

Dalam situasi seperti ini, pendeta menghadapi tantangan untuk tetap berdiri sebagai pemimpin rohani bagi seluruh jemaat tanpa terjebak dalam arus dukungan politik tertentu. Netralitas pendeta bukan berarti mengabaikan realitas sosial, melainkan menjaga jarak dari politik praktis agar gereja tidak kehilangan identitasnya sebagai tubuh Kristus. Sikap netral tersebut diwujudkan melalui beberapa langkah konkret. Pertama, pendeta menegaskan dalam mimbar dan pembinaan bahwa gereja tidak menjadi alat kampanye atau ruang legitimasi politik. Gereja tidak mengarahkan pilihan politik jemaat, melainkan membentuk kesadaran moral dan etika Kristen dalam berpolitik. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa pemerintah memang ditetapkan Allah untuk menjalankan fungsi ketertiban sosial tetapi gereja memiliki mandat yang berbeda, yaitu memberitakan Injil dan membina kehidupan rohani umat. Dengan demikian, terjadi pembedaan yang jelas antara otoritas rohani dan otoritas politik.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji tentang politik praktis dalam gereja. Joseph Ohoiledjaan dan Ignasius Samson Sudirman Refo, dalam penelitian mereka berjudul *"Bahaya Keterlibatan Hierarki Gereja Dalam Politik Praktis,"* menyoroti dampak yang dapat muncul ketika hierarki gereja terlibat secara langsung dalam politik praktis. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan seperti ini berpotensi menimbulkan persoalan di dalam Gereja Katolik sendiri. Secara historis, terdapat beberapa peristiwa ketika Gereja Katolik terlibat dalam dinamika politik praktis yang kemudian memicu kontroversi serta kritik dari masyarakat. Keadaan seperti ini dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap gereja. Ketika gereja terlihat terlibat dalam praktik politik secara langsung, sebagian masyarakat dapat menilai bahwa lembaga keagamaan tidak lagi menjaga jarak dari kepentingan politik tertentu. Persepsi tersebut perlahan dapat mengurangi kepercayaan publik yang selama ini dibangun melalui pelayanan rohani dan sosial. Oleh karena itu, keterlibatan gereja dalam politik praktis berpotensi membawa dampak yang kurang baik. Tidak hanya menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat, situasi tersebut juga dapat memengaruhi citra gereja sebagai lembaga keagamaan yang seharusnya berdiri independen, bersikap netral, serta menjadi ruang yang mempersatukan umat tanpa memandang perbedaan pilihan politik. Partisipasi hierarki Gereja dalam politik juga dapat menyebabkan keputusan yang keliru yang berdampak negatif pada masyarakat. Ketika para

pemimpin Gereja Katolik terlibat langsung dalam politik praktis, ada kemungkinan kepentingan politik diprioritaskan di atas nilai-nilai moral dan ajaran agama. Situasi ini dapat memicu tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Gereja, seperti mendukung kebijakan yang tidak adil atau bertentangan dengan hak asasi manusia. Namun, Gereja pada dasarnya mengajarkan bahwa semua bentuk ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia harus ditentang.¹³ Penelitian yang dilakukan oleh Yonatan Alex Arifianto dan Yonathan Salmon Efrayim Ngesthi dengan judul *“Aktualisasi Pemimpin Gereja Menjaga Moral dan Integritas Umat dalam Menghadapi Tahun Politik”* menyoroti peran penting pemimpin gereja dalam membimbing jemaat ketika memasuki masa-masa politik. Dalam situasi yang sering dipenuhi perbedaan pilihan dan kepentingan, pemimpin gereja diharapkan mampu memberikan arah yang bijaksana agar umat tetap menjaga nilai moral dan integritasme. Melalui kepemimpinan yang bertanggung jawab, gereja dapat menolong jemaat untuk bersikap dewasa, tidak mudah terprovokasi, serta tetap memelihara persatuan di tengah perbedaan pandangan politik. Dengan demikian, gereja berperan sebagai penuntun moral yang membantu umat menghadapi dinamika politik secara bijak. Dalam penelitian ini membahas bagaimana penting seorang Para pemimpin gereja diharapkan mampu memahami esensi moralitas dan integritas dalam dunia politik, sehingga mereka dapat melihat dan menilai berbagai

¹³ Refleksi Ilmiah-pastoral dan Joseph Ohoiledjaan, *“Seri Mitra”* (2024): 173–186.

paradigma politik dan dampaknya terhadap kehidupan dan pelayanan gereja.¹⁴

Berdasarkan penelitian terdahulu, terlihat kesamaan fokus dengan penelitian ini, yaitu menyoroti peran penting para pemimpin gereja dan bagaimana keterlibatan mereka dalam politik praktis dapat memengaruhi jemaat. Meski demikian, perbedaannya terletak pada objek dan lokasi penelitian, sehingga konteksnya berbeda. Hal ini mendorong penulis untuk mengeksplorasi lebih jauh mengenai strategi yang diterapkan oleh para pemimpin gereja dalam menghadapi dinamika politik praktis. Penelitian ini akan memusatkan perhatian pada Gereja Toraja Mamasa Jemaat Maranata Balla Peu, dengan tujuan memahami langkah-langkah konkrit dan pendekatan yang mereka gunakan agar keterlibatan politik tidak merusak harmoni dan kepercayaan jemaat. Penelitian ini secara khusus berfokus pada analisis strategi dan langkah-langkah konkret yang diambil oleh para pemimpin gereja dalam mengatasi dinamika politik praktis di dalam jemaat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah Bagaimana Analisis Srategi Pemimpin Gereja Dalam Menghadapi Politik Gereja Toraja Mamasa Jemaat Maranata Balla Peu?

¹⁴ Edisi Juli et al., "Jurnal Salvation Aktualisasi Pemimpin Gereja menjaga Moral dan Integritas Umat dalam Menghadapi Tahun Politik Pendahuluan Kehidupan kekristenan yang berada dalam payung institusi pemerintahan dan juga berada dalam" 2023 (2023): 60–71.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, yang menjadi tujuan penelitian ini yakni untuk menganalisis Strategi Pemimpin Gereja Dalam Menghadapi Politik Gereja Toraja Mamasa Jemaat Maranata Balla Peu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan memperkaya kajian kepemimpinan gereja, terutama terkait strategi para pemimpin dalam menghadapi dinamika politik gereja. Temuan ini bisa menjadi rujukan akademis dan dasar pemikiran bagi pengembangan teori kepemimpinan yang efektif, bijaksana, dan sesuai dengan prinsip-prinsip nilai gereja.

2. Manfaat Praktis

Bagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Maranatha Balla Peu :Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi gereja dalam memahami realitas politik yang terjadi, khususnya terkait rangkap jabatan antara aparat desa dan majelis gereja.

Bagi peneliti : Penelitian ini menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan akademik dalam merancang penelitian, mengumpulkan dan menganalisis data . Selain itu, penelitian ini memperluas juga pemahaman peneliti mengenai kepemimpinan gereja dan politik.

E. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan. Memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan pustaka bagian ini meliputi pembahasan mengenai aspek strategi, konsep pemimpin gereja. Pembahasan politik, indikator politik dalam gereja, dan. Pembahasan mengenai dampak terhadap jemmaat.

BAB III metodologi penelitian mencakup jenis metode penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, informan yang terlibat, jenis data yang dikumpulkan, serta teknik pengumpulan dan analisis data. Selain itu, pengujian keabsahan data juga penting untuk memastikan validitas hasil penelitian, diikuti dengan penjadwalan penelitian yang mendetail.

BAB IV hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi deskriptif hasil penelitian dan analisis data.

BAB V Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran